

**STUDI PENGEMBANGAN KEUANGAN MIKRO
BAGI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN
DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU**

TESIS

Oleh
TRI CAHYO WIBOWO
07 206 026



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

Studi Pengembangan Keuangan Mikro
Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Di Kota Tanjung pinang Kepulauan Riau

Tesis S2 oleh TRI CAHYO WIBOWO
Pembimbing.: 1. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA.
2. Syon Syarid, SE. ME

RINGKASAN

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan penyediaan jasa keuangan mikro. Namun layanan keuangan mikro yang benar-benar mampu menjadi media bagi masyarakat sangat miskin untuk merubah nasib belum banyak nampak keberadaannya. Studi ini, berupaya untuk memberikan kajian mengenai pengembangan keuangan mikro yang mampu menjadi media bagi masyarakat sangat miskin dalam memberdayakan diri mereka sendiri dengan sampel rumah tangga sangat miskin di Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Melalui penelitian survey terhadap 189 sampel rumah tangga sangat miskin dengan menggunakan kuesioner dan interview secara langsung di lapangan terhadap key informan, studi ini mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin serta alternatif pengembangan keuangan mikro bagi rumah tangga sangat miskin.

Hasil studi memperlihatkan rumah tangga sangat miskin di lokasi penelitian, cenderung tidak memiliki anggota rumah tangga besar. Jumlah Anggota Rumah tangga sebanyak 4 (empat) ke bawah mencapai 66,7% dari keseluruhan rumah tangga sampel. Lebih dari 31%, tingkat pendidikan kepala rumah tangga sangat miskin, memiliki ijazah setingkat SLTP ke atas. Mereka sebagian besar bekerja di sektor informal dan tidak memiliki pekerjaan tambahan. Dengan penghasilan yang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampai dengan saat ini, terdapat komitmen global dari negara-negara untuk berupaya menghapus kemiskinan. Paling tidak, ada dua event internasional yang mendukung komitmen tersebut. Yang pertama, pada saat diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York tahun 2000, menetapkan upaya mengurangi separuh dari kemiskinan di dunia sebagai "Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*)" bagi negara-negara anggota PBB yang harus dicapai pada tahun 2015 melalui 8 jalur sasaran, di mana salah satu sasaran tersebut adalah mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan. Para pemimpin dunia berjanji bekerja sama untuk mencapai target dalam pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Event yang kedua, dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg pada bulan September tahun 2002 juga disepakati bahwa kemiskinan sebagai agenda prioritas dalam pembangunan berkelanjutan (Hadad : 2003).

Di Indonesia, keberpihakan terhadap masalah kemiskinan diawali dengan landasan konstitusi UUD 1945 yang menggariskan tujuan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan tersebut akan terwujud bila masalah pembangunan berupa kesenjangan, pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi (Sumodiningrat : 2003). Telah banyak, kebijakan maupun langkah kebijakan dilakukan Pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kemiskinan. Baik melalui perluasan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, melalui perlindungan sosial, penanganan gizi kurang dan rawan pangan maupun melalui perluasan kesempatan berusaha. Namun, ada kecenderungan, masyarakat yang benar-benar miskin masih belum mampu untuk membebaskan diri dari kemiskinan.

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dengan penyediaan jasa keuangan mikro (Hadinoto:2005). Tersedianya akses pembiayaan, termasuk juga jasa-jasa keuangan lainnya seperti kredit mikro, simpanan, transfer, memungkinkan masyarakat miskin melakukan berbagai kegiatan ekonomi produktif dan mengembangkan kapasitas usahanya secara berkesinambungan. Pada gilirannya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam arti yang lebih luas.

Terdapat dua pandangan dalam menyikapi upaya pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang benar-benar miskin (sangat miskin). Pandangan pertama, beranggapan bahwa masyarakat yang benar-benar miskin lebih memerlukan bantuan yang bersifat langsung, sehingga tidak

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Komposisi tingkat pendidikan kepala rumah tangga sangat miskin di daerah penelitian sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Dalam banyak pandangan, terdapat kecenderungan komposisi tingkat pendidikan anggota rumah tangga miskin lebih dominan tidak sekolah atau tidak tamat SD. Agak berbeda dengan hal tersebut, pada kepala rumah tangga sangat miskin, ternyata lebih dari 31% memiliki ijazah setingkat SLTP ke atas. Kondisi ini sebenarnya membuka kesempatan kepala rumah tangga sangat miskin untuk ikut bersaing dalam lapangan kerja formal.
2. Pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga sangat miskin sebagian besar hanya bergantung kepada kepala rumah tangga, yang bekerja pada sektor informal. Hanya sebagian kecil istri dan anak di rumah tangga sangat miskin membantu pemenuhan tersebut. Kondisi tersebut, berdampak pada ketidakmampuan rumah tangga sangat miskin menyisihkan sebagian penghasilan untuk menabung.
3. Rumah tangga sangat miskin tidak mendapatkan akses keuangan mikro formal, namun aktifitasnya tidak bisa lepas dari urusan meminjam. Aktifitas meminjam rumah tangga sangat miskin cenderung hanya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin.** 2006. *Menanti Kemakmuran Negeri*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto, Suharsini.** 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin.** 2008. *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja, dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Asnaini, S.Ag., M.Ag.** 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ashari,** 2006, *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*, dalam Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 4 No. 2, Juni : 146-164.
- Bank Dunia,** 2004. *Kredit Untuk Penduduk Miskin, Dari Skema Subsidi Menuju Keuangan Berkelanjutan*, dalam *Indonesia Policy Brief*.
- Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD,** 2008. *Profil Dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press
- Bank Indonesia,** 2008. *Statistik Keuangan Daerah Kepulauan Riau*. Vol. 4 No. 45 September.
- BPS Propinsi DKI Jakarta,** 2007. *Berita Resmi Statistik*, No. 29/08/31/Th.IX Agustus.
- BPS RI Jakarta,** 2006. *Berita Resmi Statistik*, No. 47/IX/1 September.
- Bappeda Kota Tanjungpinang,** 2003. *Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2007*.
- Bappeda Kota Tanjungpinang,** 2007. *Studi Perencanaan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*
- Bappeda Kota Tanjungpinang,** 2008. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Tanjungpinang Tahun 2008-2013*
- Bungin, Burhan.** 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.